

PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

Juniati Gunawan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti

yuni_gnw@hotmail.com

Abstract: *This study aims to find out the influence of corporate social responsibility (CSR) and corporate governance (CG) with tax aggressiveness. Sample in this study is 42 with criterias: companies in Indonesia which provide sustainability reports in 2014 and obtain positif profit. Analysis were conducted by using multiple regression analysis. The result shows that CSR significantly influence tax aggressiveness. The more extensive CSR disclosures, it seems that companies tend to be more aggressive in applying tax. On the other hand, this study finds that corporate governance (CG) does not significantly influence tax aggressiveness. A good corporate governance score does not mean an effective corporate governance mechanism in combating un ethical behavior of managers in managing taxes.*

Keywords: *corporate social responsibility, corporate governance, tax aggressiveness.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) dan *corporate governance* (CG) terhadap agresivitas pajak. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 42 perusahaan di Indonesia yang menyajikan laporan keberlanjutan tahun 2014 dan mempunyai laba positif. Uji analisis menggunakan model analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Semakin luas pengungkapan CSR maka perusahaan cenderung semakin agresif terhadap pajak. Namun demikian, pengujian untuk *corporate governance* (CG) menunjukkan bahwa CG tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Skor tata kelola perusahaan yang baik belum mampu mencerminkan mekanisme tata kelola perusahaan yang efektif dalam membatasi perilaku menyimpang manajer dalam hal perpajakan.

Kata kunci: *corporate social responsibility, corporate governance, agresivitas pajak.*

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya perdagangan barang melalui internet, baik dalam dan luar negeri, semakin memudahkan terjadinya praktik profit *shifting*. Praktik profit *shifting* ini dilakukan dengan memindahkan penghasilan yang diperoleh di suatu negara dengan *tax rate* tinggi ke negara *tax haven* (*tax rate* yang rendah). Menurut Andri (2016), praktik ini sangat merugikan bagi negara karena pelaku usaha sudah memperoleh penghasilan serta menikmati fasilitas publik tetapi hanya membayar pajak yang kecil atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali di tempat perusahaan memperoleh penghasilan.

Tujuan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan melalui tindakan efisiensi pajak bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Perusahaan berusaha untuk mengefisienkan beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka mensejahterakan *shareholder* dan

mempertahankan keberlanjutan perusahaan di masa depan. Namun disisi lain, berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak berdampak negatif pada penyediaan fasilitas publik bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan salah satu tanggung jawab dan wujud kontribusi perusahaan terhadap sosial dan masyarakat di suatu negara.

Kurangnya kesadaran dan kepedulian wajib pajak akan pentingnya peranan pajak serta kecenderungan ketidakrelaan untuk membayar pajak ketika memperoleh penghasilan sering menimbulkan tindakan agresif seperti penghindaran pajak. Menurut Frank, Lynch & Rego (2009), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal atau ilegal.

Lanis dan Richardson (2013) menjelaskan bahwa tindakan manajerial yang dirancang untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresif pajak menjadi strategi yang semakin umum dilakukan oleh perusahaan di seluruh dunia. Namun demikian, agresivitas pajak perusahaan dapat menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan. Di satu sisi, perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya, tetapi disisi lain tindakan ini menjadi perhatian publik yang dapat menimbulkan persepsi negatif dan mempengaruhi nama baik perusahaan, bahkan dapat mempengaruhi keberlanjutan perusahaan di masa yang akan datang. Selain itu, perusahaan memiliki kewajiban mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang akan berdampak negatif apabila tidak dilakukan sesuai harapan masyarakat.

Ketidak selarasan kepentingan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan terhadap strategi pajak perusahaan akan menimbulkan masalah keagenan. Menurut Timothy (2010), tujuan pengelola perusahaan melakukan agresivitas pajak adalah untuk meminimalkan beban pajak sehingga meningkatkan keuntungan perusahaan tetapi disisi lain biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan tindakan agresif terhadap pajak sangat mahal. Hal ini menunjukkan bahwa melakukan tindakan agresivitas pajak tidak memberikan keuntungan terhadap pemilik perusahaan.

Konflik kepentingan yang terjadi antara pemilik dan pengelola perusahaan dapat diatasi melalui tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang baik sebagai suatu mekanisme yang digunakan untuk mengontrol manajer (Shleifer dan Vishny, 1997). Penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* (CG) mampu mengurangi tindakan pajak agresif yang diyakini mampu membatasi ruang gerak manajemen sehingga akan sulit untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Tata kelola perusahaan mampu mengurangi tindakan oportunistik manajer dalam memaksimalkan kepentingan sendiri.

Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan penelitian Lanis dan Richardson (2012) dan Timothy (2010) untuk menguji pengaruh CSR dan CG terhadap agresivitas pajak. Penelitian Lanis dan Richardson (2012) dilakukan dengan mengambil sampel pada perusahaan di Australia sedangkan Timothy (2010) mengambil sampel pada perusahaan di Hongkong. Untuk mendapatkan bukti empiris jika kajian CSR, CG dan agresivitas pajak dilakukan di Indonesia, maka penelitian ini akan menguji kembali adanya hubungan antara CSR dan CG dengan agresivitas pajak. Kajian ke-tiga variabel ini relatif sangat jarang dilakukan di Indonesia, padahal isu tentang CSR, CG dan pajak merupakan topik yang berkembang pesat di Indonesia. Hal ini dapat dicermati dengan adanya isu *tax amnesty* akhir-akhir ini, atau peraturan CSR dan asesmen CG yang menjadi perhatian banyak perusahaan Indonesia.

KAJIAN TEORI

Teori Legitimasi. Teori Legitimasi merupakan sebuah teori yang fokus pada interaksi perusahaan dengan para stakeholder. Perusahaan memerlukan legitimasi atau pengakuan dari para *stakeholder* agar mampu mempertahankan keberlangsungan perusahaan. Hidayati dan Murni (2009) menyatakan bahwa untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya, perusahaan mengupayakan sejenis legitimasi atau pengakuan, baik dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat sekitar di tempat perusahaan beroperasi. Legitimasi dari masyarakat dapat diperoleh jika perusahaan melakukan tanggung jawab sosial.

Selain itu, Lanis dan Richardson (2013) menjelaskan teori legitimasi yang mendukung pernyataan bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya, perusahaan menyediakan informasi CSR sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu perusahaan dan meningkatkan reputasi perusahaan. Secara spesifik, kelangsungan hidup suatu perusahaan akan terancam jika masyarakat mempersepsikan bahwa perusahaan melanggar kontrak sosial atau aktivitas CSR yang dilakukan tidak sesuai harapan masyarakat.

Teori Agensi. Agency Theory merupakan kontrak antara satu atau beberapa pemilik perusahaan yang mendelegasikan wewenang kepada beberapa orang lain sebagai pengelola perusahaan untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Konflik agensi muncul ketika pengelola perusahaan mengambil keuntungan untuk memaksimalkan keuntungannya. Hal ini dapat terjadi karena pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui kondisi perusahaan dan informasi internal dibanding pemilik perusahaan.

Timothy (2010) menjelaskan bahwa konflik antara pemegang saham dan manajemen terjadi karena adanya perbedaan kepentingan. Manajer melakukan tindakan agresif terhadap pajak untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, tetapi di sisi lain biaya yang dikeluarkan juga sangat mahal. Biaya ini, misalnya biaya *non tax* yang harus dikeluarkan untuk memanipulasi transaksi-transaksi perusahaan dalam rangka mengefisiensikan beban pajak yang ditanggung perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan ini tidak sepenuhnya menguntungkan pemegang saham. Untuk mengatasi konflik ini diperlukan sistem tata kelola yang baik untuk memantau tindakan manajer dalam setiap pengambilan keputusan.

Corporate Social Responsibility. *Corporate social responsibility* (CSR) merupakan aktivitas yang berkaitan dengan etika dan tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Gunawan, 2015). Pelaksanaan CSR merupakan wujud partisipasi dan perhatian perusahaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas yang berdampak positif bagi keberlangsungan hidup perusahaan.

Pelaporan aktivitas CSR perusahaan dapat dipergunakan sebagai salah satu alat evaluasi atas kinerja perusahaan serta dianggap sebagai praktik akuntabilitas perusahaan (Gunawan, 2012). Salah satu alasan perusahaan memerlukan pengungkapan kinerja sosial yaitu pengungkapan CSR akan bermanfaat bagi perusahaan dalam peningkatan keuntungan di masa depan (Peloza, 2011). Aktivitas CSR dapat dilaporkan dalam dua jenis laporan yaitu menjadi bagian laporan tahunan atau terpisah dari laporan tahunan,

yaitu dalam laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan terdiri dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, termasuk kinerja perusahaan dan pengembangan keberlanjutan produk perusahaan. Pedoman standar pelaporan aktivitas CSR pada laporan keberlanjutan dikembangkan oleh *the Global Reporting Initiative (GRI)* yang telah diterapkan di seluruh negara. Mulai Mei 2013, standar pelaporan CSR dalam laporan keberlanjutan yang dipakai adalah GRI versi 4.

Corporate Governance. *Corporate governance (CG)* merupakan sebuah sistem yang dipergunakan untuk menyeleraskan kepentingan agen dengan pemilik perusahaan dalam mengelola perusahaan (Timothy, 2010). Kunci utama keberhasilan CG adalah membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang baik. Terwujudnya keseimbangan pengawasan dan pengendalian pengelolaan perusahaan akan menjadi penghambat bagi manajer untuk membuat kebijakan sesuai kepentingan pribadi serta mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan (Jao dan Pagalung, 2011).

Pada praktek penerapan CG, perusahaan di wilayah Asia diwajibkan menggunakan Asean Corporate Governance *scorecard* sebagai tolak ukur untuk menilai tata kelola perusahaan. ASEAN CG *scorecard* merupakan inisiatif dari ASEAN Capital Market Forum (ACMF) yang beranggotakan para regulator pasar modal di negara ASEAN. *Scorecard* ini juga telah digunakan untuk menilai praktek CG perusahaan terbuka di negara ASEAN lainnya yaitu Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam. Asean CG *scorecard* mengacu pada prinsip-prinsip CG yang dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang meliputi (1) hak-hak pemegang saham; (2) perlakuan yang setara terhadap pemegang saham; (3) peran pemangku kepentingan; (4) pengungkapan dan transparansi; dan (5) tanggungjawab dewan. Kelima prinsip-prinsip tersebut dijabarkan secara komprehensif ke dalam 219 pertanyaan. Selain itu, ditambahkan pula terkait pengungkapan informasi tambahan yaitu bonus dan pinalti yang dijabarkan dalam 30 pertanyaan.

Agresivitas Pajak. Agresivitas pajak merupakan hal yang sekarang sangat umum terjadi dikalangan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Tindakan ini bertujuan untuk meminimalkan pajak perusahaan yang kini menjadi perhatian publik karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan juga merugikan pemerintah. Menurut Avi-Yonah (2008), tujuan meminimalkan jumlah pajak perusahaan yang akan dibayar menjadi salah satu hal yang harus dipahami dan melibatkan beberapa etika, masyarakat atau adanya pertimbangan dari pemangku kepentingan perusahaan. Namun di sisi lain pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan memiliki implikasi penting bagi masyarakat dalam hal pendanaan barang publik seperti pendidikan, pertahanan nasional, kesehatan masyarakat dan hukum (Sikka, 2010).

Cara untuk mengukur perusahaan yang melakukan agresivitas pajak yaitu dengan menggunakan proksi *effective tax rates (ETR)*. Proksi ETR dinilai menjadi indikator adanya agresivitas pajak apabila memiliki ETR mendekati angka nol. Semakin rendah nilai ETR yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak.

Corporate Social Responsibility dan Agresivitas Pajak. Gunawan (2010) menjelaskan bahwa pengungkapan CSR yang dilaporkan dalam laporan tahunan maupun terpisah memberikan dampak positif pada nama baik dan reputasi perusahaan di masyarakat. Hal

ini disebabkan karena pengungkapan CSR merupakan wujud tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan serta untuk memenuhi harapan masyarakat.

Di lain pihak, tindakan agresivitas pajak pada dasarnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan memiliki dampak negatif terhadap masyarakat karena berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah dalam menyediakan fasilitas publik (Lanis dan Richardson, 2013). Selain itu, tindakan ini merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab karena di satu sisi perusahaan meningkatkan keuntungan tetapi di sisi lain menyebabkan penurunan pendapatan negara atas pajak. Penelitian sebelumnya yang menguji hubungan CSR dan agresivitas pajak telah dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2013). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa CSR mempengaruhi tindakan agresivitas pajak secara signifikan. Namun demikian, hasil penelitian itu perlu diuji lagi dengan mengambil sample perusahaan di Indonesia. Pengujian ini penting karena item pengungkapan CSR pada setiap negara berbeda-beda berdasarkan dengan kondisi politik, sosial, ekonomi, hukum dan lingkungan yang dimiliki suatu negara (Endacott, 2004).

Berdasarkan pemahaman bahwa pengungkapan CSR akan mempengaruhi tindakan agresivitas pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1: *Corporate social responsibility* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Corporate Governance dan Agresivitas Pajak. Timothy (2010) menyatakan bahwa konflik yang terjadi antara pengelola dan pemilik perusahaan terjadi karena perbedaan kepentingan diantara keduanya. Di satu sisi, pengelola perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak dengan tujuan ingin meningkatkan kompensasi yang diterima melalui peningkatan keuntungan. Namun di sisi lain, biaya yang dikeluarkan juga sangat tinggi sehingga tindakan tersebut merugikan pemilik perusahaan.

Konflik kepentingan dapat dihindari jika perusahaan menerapkan sistem CG yang baik pada perusahaannya. Selain itu, CG juga digunakan untuk mengendalikan tindakan manajer yang mementingkan keuntungan sendiri. Selanjutnya pemilik perusahaan dapat memantau tindakan yang diambil pengelola dalam mengelola perusahaannya melalui penerapan CG. Penelitian antara CG dan agresivitas pajak dilakukan oleh Timothy (2010) dan hasilnya menunjukkan bahwa CG mempengaruhi kegiatan agresivitas pajak. Sama halnya dengan kegiatan CSR, penerapan CG di tiap negara juga berbeda tergantung kondisi ekonomi, hukum, dan lingkungan di suatu negara. Oleh karenanya, penelitian ini mengajukan hipotesis:

H2: *Corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

METODE

Corporate Social Responsibility. Pengungkapan CSR dianalisis menggunakan informasi pada laporan keberlanjutan yang disajikan terpisah dari laporan tahunan. CSR dalam penelitian ini diukur menggunakan daftar pengungkapan yang diadopsi dari penelitian Gunawan (2010). Daftar pengungkapan ini dilakukan oleh Gunawan (2010) berdasarkan penelitiannya dalam menilai pentingnya informasi yang diinginkan oleh *stakeholder* di Indonesia. Ada 46 item pengungkapan CSR yang dikategorikan menjadi 8 tema yaitu *environment, energy, human resources, communities, products, sustainability, external relation* dan *other info*.

Metode *content analysis* dilakukan dengan menggunakan bobot yang dinilai berdasarkan seberapa banyak pengungkapan CSR yang dibuat dalam Laporan

Keberlanjutan dengan nilai 1 (informasi disajikan hanya dalam kalimat saja) sampai dengan nilai 5 (informasi disajikan dalam lebih dari 1 halaman A4). Angka skoring ini diadopsi dari Raar (2002).

Proses penggunaan metode *content analysis* yaitu, pertama, membaca laporan keberlanjutan perusahaan untuk setiap item analisis yang disajikan. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah informasi yang diungkapkan dalam SR berkaitan dengan item-item pengungkapan CSR. Jika ada informasi yang berkaitan dengan item pengungkapan, maka dinilai seberapa banyak diungkapkan dan diberi skor dari 1 sampai 5:

1. Angka 1 bila item CSR diungkapkan dalam beberapa kalimat;
2. Angka 2 bila item CSR diungkapkan dalam beberapa paragraf;
3. Angka 3 bila item CSR diungkapkan sebanyak setengah halaman A4;
4. Angka 4 bila item CSR diungkapkan sebanyak satu halaman A4; dan
5. Angka 5 bila item CSR diungkapkan sebanyak lebih dari 1 halaman A4.

Setelah memberikan skor pada informasi yang sesuai dengan daftar pengungkapan, maka total nilai tiap tema dijumlahkan dan dibagi dengan maksimum nilai yang diperoleh. Setelah itu, nilai CSR didapat dengan menghitung rata-rata jumlah nilai yang diperoleh dari masing-masing 8 tema tersebut.

Corporate Governance. Pengukuran CG dilakukan berdasarkan pengungkapan CG yang disajikan di laporan tahunan dan informasi dari *website* setiap perusahaan. Dalam penelitian ini CG diukur menggunakan ASEAN CG *scorecard* sesuai prinsip yang dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam ASEAN *Corporate Governance Scorecard: Country reports and assessments 2013–2014* (Asian Development Bank, 2014). Proses dari analisis menggunakan ASEAN CG *scorecard* yaitu dengan membaca laporan tahunan perusahaan dan informasi pada *website* perusahaan untuk menjawab 209 pertanyaan yang diajukan dalam *scorecard* tersebut. Skor 1 diberikan jika jawabannya YA dan skor 0 jika jawabannya TIDAK. Selanjutnya skor yang diperoleh pada tiap bagian dihitung sesuai ketentuan dalam ASEAN *Corporate Governance Scorecard : Country reports and assessments 2013–2014* (Asian Development Bank, 2014).

Agresivitas Pajak. Agresivitas pajak diukur dengan *effective tax rates* (ETR). ETR menggambarkan presentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total pendapatan sebelum pajak. ETR merupakan proksi yang paling banyak digunakan dalam penelitian terdahulu dan untuk mengetahui adanya agresivitas pajak dapat dilihat dari nilai ETR yang rendah (Lanis dan Richardson, 2013). ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak. Proksi ETR dapat dihitung dari prosentase beban pajak penghasilan terhadap pendapatan sebelum pajak pada tahun berjalan.

Model Regresi Berganda. Metode regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur pengaruh variabel CSR dan CG terhadap agresivitas pajak yang diproksi ETR. Adapun persamaan statistiknya adalah:

$$ETR = \beta_0 + \beta_1 CSR + \beta_2 CG + e$$

Keterangan: ETR = Agresivitas Pajak; β_0 = Konstanta; β_1, β_2 = Koefisien variabel;

CSR = Prosentase rata-rata pengungkapan CSR; CG = Skor CG yang diperoleh; e = Error

Populasi dan Sampel. Populasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah semua perusahaan di Indonesia yang menyajikan laporan keberlanjutan tahun 2014 yang daftar

perusahaannya diperoleh darisitus <http://sra.ncsr-id.org/category/sustainability-reports/>. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria yaitu perusahaan yang memiliki laba positif pada tahun 2014. Laba perusahaan digunakan untuk mengukur ETR dan nilai ETR harus positif. Agar nilai ETR positif, perusahaan harus memiliki laba positif yang disajikan dalam laporan keuangannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan analisis terhadap hasil regresi, pemenuhan asumsi klasik diuji terhadap model regresi dalam penelitian ini. Hasil uji normalitas data menunjukkan sig dari KS-Z = 0,110 > 0,05 yang artinya distribusi dari *error* adalah normal sehingga lolos uji normalitas. Uji Autokorelasi tidak perlu dilakukan karena penelitian ini hanya mengambil satu periode penelitian. Untuk uji multikolinieritas, ketentuannya jika nilai VIF dari setiap variabel independen < 10 maka model regresi terbebas dari multikolinieritas dan hasil pengujian ini menunjukkan nilai VIF dari CSR = 1,068 < 10 dan nilai VIF dari CG = 1,068 < 10 yang artinya model regresi dalam penelitian ini terbebas dari multikol. Selanjutnya, untuk uji heteroskedastisitas dengan ketentuannya jika nilai sig dari t untuk setiap variabel independen > 0,05 maka model regresi terbebas dari multikolinieritas dan hasil pengujian ini menunjukkan nilai sig dari t untuk CSR = 0,168 > 0,05 dan nilai sig dari t untuk CG = 0,145 > 0,05 yang artinya model regresi dalam penelitian ini terbebas dari permasalahan heteroskedastisitas.

Statistik Deskriptif. Penelitian ini mengambil sampel keseluruhan sebanyak 42 dari total populasi 50 perusahaan yang menyajikan laporan keberlanjutan. Delapan perusahaan tidak dapat dijadikan sampel karena tidak menyajikan laba yang positif.

| | |
|---|------------------|
| Perusahaan yang menyajikan Laporan Keberlanjutan Tahun 2014 | = 50 perusahaan |
| Tidak menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2014 | = (4 perusahaan) |
| Mengalami kerugian berdasarkan LK Tahun 2014 | = (4 perusahaan) |

| | |
|---------------|-----------------|
| Jumlah Sampel | = 42 perusahaan |
|---------------|-----------------|

Tabel 1 menunjukkan deskriptif statistik dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

| Variabel | N | Minimum | Maksimum | Mean | Std Deviation |
|-----------------------|----|---------|----------|-------|---------------|
| CSR | 42 | 35,99 | 78,02 | 61,79 | 9,27 |
| GCG | 42 | 52,97 | 131,56 | 79,98 | 14,19 |
| ETR | 42 | 0,15 | 88,12 | 29,15 | 13,23 |
| Valid N (listwise) | 42 | | | | |

Sumber: Data diolah dengan SPSS 20

***Corporate Social Responsibility* dan Agresivitas Pajak**

Hasil pengujian hipotesis pertama terlampir pada Tabel 2.

Tabel 2. Uji t (Uji Parsial) Variabel CSR (X1)

| Model | | Coefficients ^a | | | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 67,220 | 15,508 | | 4,335 | ,000 |
| | CSR | -,425 | ,219 | -,298 | -1,937 | ,030 |

a. Dependent Variable: ETR

Sumber : Data diolah dengan SPSS 20

Tabel 2 menunjukkan nilai koefisien regresi pada CSR sebesar -0,425 dan t hitung dari CSR adalah sebesar -1,937 (-t hitung < -t tabel) dengan nilai signifikansi $0,030 < 0,05$ sehingga hipotesis pertama diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa CSR mempunyai pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Nilai koefisien regresi pada CSR menunjukkan nilai negatif sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai CSR maka semakin rendah nilai ETR. Nilai ETR semakin mendekati nilai nol menunjukkan perusahaan cenderung lebih agresif terhadap pajak. Hal tersebut menjelaskan bahwa perusahaan yang mengungkapkan CSR lebih banyak akan cenderung melakukan agresivitas pajak karena perusahaan yang melakukan agresivitas pajak berusaha melakukan pengalihan perhatian sehingga mengungkapkan aktivitas CSR lebih luas untuk mendapat citra positif dari para stakeholder.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lanis dan Richardson (2013) yang menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan agresivitas pajak lebih banyak mengungkapkan aktivitas CSR dibanding perusahaan yang tidak melakukan agresivitas pajak.

Corporate Governance dan Agresivitas Pajak. Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis kedua disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Uji t (Uji Parsial) Variabel CG (X2)

| Model | | Coefficients ^a | | | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 67,220 | 15,508 | | 4,335 | ,000 |
| | CG | -,148 | ,143 | -,158 | -1,031 | ,154 |

b. Dependent Variable: ETR

Sumber : Data diolah dengan SPSS 20

Tabel 3 menunjukkan nilai koefisien regresi pada variabel *corporate governance* (CG) sebesar -0,148 dan t hitung dari kompetensi sebesar -1,031 (-t hitung > -t tabel) dengan nilai signifikansi $0,154 > 0,05$ sehingga keputusannya hipotesis kedua ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Tata kelola perusahaan seharusnya mampu mempengaruhi keluasaan dilakukannya tindakan perencanaan pajak yang agresif, sesuai dengan beberapa penelitian lain, seperti penelitian yang dilakukan oleh Richardson, Taylor & Lanis (2013). Namun demikian,

hasil penelitian ini tidak dapat menunjukkan adanya pengaruh CG pada agresivitas pajak. Hal ini dapat disebabkan karena pemenuhan syarat dan prinsip tata kelola hanya dianggap sebagai “pemenuhan kewajiban” yakni sekedar memenuhi peraturan perundangan di Indonesia. Contohnya, pemenuhan jumlah komisaris independen serta keberadaan komite audit hanya sebatas untuk memenuhi peraturan tanpa ada tujuan untuk memperbaiki tata kelola dengan benar. Hal ini dijelaskan pada penelitian Siregar dan Utama (2008) bahwa tata kelola perusahaan di Indonesia masih sekedar sebagai pemenuhan undang-undang, belum sebagai upaya untuk perbaikan tata kelola secara baik.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia sudah mulai menerapkan ASEAN CG *scorecard* tetapi banyak perusahaan yang belum mengungkapkan informasi terkait hasil penilaian CG dengan ASEAN CG *scorecard* secara terinci sesuai prinsip-prinsip yang dikembangkan OECD baik dalam Laporan Tahunan maupun disajikan pada *website* perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih beranggapan bahwa penerapan CG masih sebatas dokumentasi. Seharusnya, penerapan CG yang baik akan berdampak signifikan dalam meningkatkan nilai perusahaan untuk menarik investor serta memberikan persepsi positif bagi publik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bukan hanya penerapan saja yang penting tetapi hasil penilaian dan informasi penting lainnya juga harus disajikan dalam laporan tahunan maupun *website* perusahaan agar perusahaan dapat memiliki nilai tambah baik dimata para investor, dan para *stakeholder* lainnya.

PENUTUP

Simpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh *corporate social responsibility* dan *corporate governance* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan di Indonesia, maka dapat disimpulkan: **Pertama.** Terdapat pengaruh signifikan antara *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil pengolahan data, nilai koefisien regresi CSR terhadap ETR adalah negatif sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin luas pengungkapan CSR maka tingkat agresivitas pajak semakin tinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa perusahaan yang mengungkapkan aktivitas CSR lebih luas cenderung lebih agresif terhadap pajak.

Aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk mengalihkan perhatian masyarakat atas tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan citra positif dari para *stakeholder* sehingga perusahaan dapat terus *going concern* dalam menjalankan usahanya. Namun, tindakan ini akan berdampak signifikan akan keberlanjutan perusahaan di masa yang akan datang. Selain itu, kurangnya kepedulian dan pemahaman perusahaan terkait aktivitas CSR ini dapat dilihat dari masih sedikitnya perusahaan di Indonesia yang menyajikan laporan keberlanjutan atas pelaksanaan CSR yang dilakukan perusahaan.

Kedua. Tidak terdapat pengaruh signifikan antara *corporate governance* terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut menjelaskan bahwa nilai tata kelola perusahaan yang baik belum mampu mencerminkan mekanisme tata kelola perusahaan yang efektif dalam membatasi perilaku menyimpang manajer dalam hal perpajakan. Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik tidak ada jaminan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan tindakan agresif terhadap pajak.

Begitu juga dengan perusahaan yang memiliki tata kelola yang buruk belum tentu melakukan tindakan agresif terhadap pajak. Pandangan bahwa tata kelola perusahaan

merupakan sekedar pemenuhan undang-undang menyebabkan pelaksanaan tata kelola perusahaan tidak efektif. Hal ini dapat dijadikan sebagai evaluasi terhadap berbagai peraturan yang ada agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap tata kelola perusahaan dengan lebih baik di Indonesia misalnya peraturan yang mengharuskan perusahaan untuk menyajikan secara lengkap hasil penilaian CG perusahaan menggunakan ASEAN CG *scorecard*.

Penelitian ini tentunya masih terdapat kekurangan oleh karena adanya kendala selama proses penulisan maupun pengumpulan data. Kendala yang dialami diantaranya sebagai berikut: (1) Keterbatasan jumlah sampel penelitian dikarenakan masih sedikitnya perusahaan di Indonesia yang menyajikan laporan keberlanjutan tahun 2014. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang digunakan sebanyak 42 sampel perusahaan, yang mungkin akan mempengaruhi kredibilitas hasil pengujian karena terbatasnya jumlah sampel ini. Tahun 2014 dipilih karena merupakan tahun laporan terbaru pada saat penelitian ini dilakukan. (2) Penggunaan metode *content analysis* selalu berkaitan dengan isu subyektifitas yang disampaikan oleh banyak penelitian sebelumnya (Gunawan, 2010; Lanis dan Richardson, 2013); (3) Sebagian besar perusahaan di Indonesia tidak menyajikan hasil penilaian CG menggunakan ASEAN CG *scorecard* secara rinci. Hal ini menyebabkan pengukuran ASEAN CG *scorecard* perusahaan terbatas pada laporan tahunan serta informasi yang disajikan pada website perusahaan saja. Hal ini dapat menyebabkan kurang lengkapnya informasi yang disajikan perusahaan akan mengurangi skor CG yang diperoleh.; (4) Kelemahan pengukuran menggunakan ETR dalam memproksikan agresivitas pajak. Perhitungan ETR menggunakan total beban pajak perusahaan tahun berjalan yang terdiri dari *current tax* dan *deffered tax*. Hal ini mengakibatkan perusahaan yang mengalami laba pada tahun berjalan tetapi masih mendapatkan kompensasi kerugian tahun sebelumnya maka tidak menanggung beban pajak pada tahun berjalan. Dengan demikian pengukuran ETR kurang tepat memproksikan agresivitas pajak karena tidak menunjukkan beban pajak kini yang sebenarnya ditanggung perusahaan.

Saran. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diberikan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu: (1) Sampel yang digunakan lebih banyak agar hasil penelitian lebih mencerminkan keseluruhan populasi perusahaan di Indonesia sehingga hasil penelitiannya lebih *reliable*; (2) Sampel yang digunakan dapat diklasifikasikan berdasarkan bidang / jenis perusahaan agar dapat melihat tingkat agresivitas pajak pada tiap jenis perusahaan sehingga hasil penelitiannya lebih menyeluruh dalam berbagai bidang perusahaan; (3) Rentang periode penelitian yang lebih panjang agar dapat dilihat pola agresivitas pajak pada perusahaan di Indonesia dari tahun ke tahun sehingga hasil penelitiannya dapat menjelaskan trend yang dialami perusahaan dalam menghadapi kondisi perekonomian yang berubah-ubah; (4) Dalam pengukuran CSR selain dengan penilaian kuantitas dapat juga ditambahkan menggunakan kategori penilaian berdasarkan kualitas pengungkapan CSR yang disajikan sehingga hasil penelitiannya lebih komprehensif dengan persepsi para *stakeholder* seperti penelitian yang dilakukan Gunawan (2010); (5) Pengukuran *corporate governance*, selain berdasarkan informasi yang disajikan dalam laporan tahunan dan *website* perusahaan dapat ditambahkan informasi dari dokumen resmi perusahaan yang lain seperti anggaran dasar, pedoman perusahaan dan lainnya sehingga hasil penelitiannya lebih akurat dan lengkap dalam melakukan penilaian; (6) Agresivitas Pajak dapat diukur dengan yang indikator yang lain seperti *Current ETR*, *Cash ETR*, *BTD* dan lain

sebagainya sehingga dapat melihat hasil yang konsisten dan tepat dalam memproksikan agresivitas pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- Andri, Muhammad. (2016) *Memburu pajak di era digital economy*. Error! Hyperlink reference not valid. diakses pada tanggal 21 Januari 2016.
- Asian Development Bank. (2014) *Asean Coporate Governance Scorecard: Country reports and assessment 2013-2014*. Mandaluyong City, Philippines.
- Avi-Yonah, R. S. (2008) "Corporate Social Responsibility and Strategic tax behavior". In Schon, E. (Ed.). *Tax and Corporate Governance*. Springer-Verlag. Berlin dan Heidelberg.
- Endacott, R. (2004) Consumers and CRM: a national and global perspective. *Journal of Consumer Marketing*, 21 (3), 183-189.
- Frank, M. M., Lynch, J. L., & Rego, S. O. (2009) Are financial and tax reporting aggressiveness reflective of broader corporate policies?. *The Accounting Review*, 84(2), 467-496.
- Gunawan, J. (2015) "Corporate Social Disclosures in Indonesia: Stakeholders' Influence and Motivation". *Social Responsibility Journal*, 11 (3), 535 – 552.
- Gunawan, J. (2010) "Perception of Important Information in Corporate Social Disclosure: Evidence from Indonesia". *Social Responsibility Journal*, 6(10), 62-71.
- Gunawan, J. & Hermawan, R. (2012) "Corporate Social Disclosure in Southeast Asia: A Preliminary Study". *Issues in Social and Environmental Accounting*, ISSN 1978-0591 (Paper), 6 (3/4), 45-67.
- Hidayati, Nuur Naila dan Murni, Sri. (2009) "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Earnings Response Coefficient Pada Perusahaan High Profile". *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 11 (1), April: 1-18.
- Lanis, R., dan Richardson, G. (2012) "Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: an Empirical Analysis". *Journal of Accounting and Public Policy*, 31, 86-108.
- Lanis, R., dan Richardson, G. (2013) "Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: a test of legitimacy theory". *Accounting Auditing and Accountability Journal*, 26 (1), 75-100.
- Pelozo, T. G. (2011) "How Does Corporate Social Responsibility Create Value for Consumers?" *Journal of Consumer Marketing*, 28 (1), 48-56.
- Jao, R., dan Pagalung, G. (2011) "Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Indonesia". *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8 (1), 1-94.
- Jensen, Michael C., & Meckling, William H. (1976) "Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and capital structure". *Journal of Financial Economics*, 3 (4), 305-360.
- Raar, J. (2002) "Environmental initiative: towards triple bottom line reporting", *Corporate Communications: An International Journal*, 7 (3), 169-183.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013) "The impact of board of director oversight characteristics on corporate tax aggressiveness: An empirical analysis". *Journal Accounting Public Policy*, 32, 68-88.

- Shleifer, A., dan Vishny R. W. (1997) "A survey of corporate governance". *Journal of Finance*, 52, 737-783.
- Sikka, P. (2010) "Smoke and Mirrors: corporate social responsibility and tax avoidance". *Accounting Forum*, 34 (3-4), 153-168.
- Siregar, Sylvia V., & Utama, S. (2008) "Type of earnings management and the effect of ownership structure, firm size, and corporate-governance practices: evidence from Indonesia". *The International Journal of Accounting*, 43, 1-27.
- Timothy, Y. C. K. (2010) *Effects of Corporate Governance on Tax Aggressiveness*. An Honours Degree Project Submitted to the School of Business in Partial Fulfilment of the Graduation Requirement for the Degree of Bachelor of Business Administration (Honours). Hong Kong Baptist University.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- Wheeler, D., Colbert, B. & Freeman, R. E. (2003) "Focusing on Value: Reconciling Corporate Social Responsibility, Sustainability and A Stakeholder Approach in A Network World". *The International Journal of Accounting*, 34 (2), 209-238.
- <http://sra.ncsr-id.org/category/sustainability-reports/> diakses pada tanggal 2 Februari 2016.